

PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang menentukan dapat dipercaya atau tidaknya laporan yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian perlu adanya konsep-konsep yang mendasarinya, yaitu tanggung jawab manajemen, jaminan yang memadai, metode pengolahan data dan keterbatasan pengendalian.

Audit internal merupakan suatu alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas intern perusahaan yang memberikan analisis, rekomendasi, bimbingan serta informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang diperiksanya, melalui *review* informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang diperiksanya, melalui *review* informasi ketaatan terhadap kebijakan, penggunaan sumber-sumber, serta *review* program yang telah dilaksanakan.

Auditor internal adalah seseorang yang melakukan aktivitas pengujian yang memberikan keandalan atau jaminan yang independen, dan obyektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan keefektifan pengendalian risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik (Akmal, 2006: 3-4).

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi

oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Auditor berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

Setiap perusahaan selalu berusaha menciptakan sistem yang baik untuk keberadaan kasnya. Kas sangat berperan terhadap jalannya operasional perusahaan, bila kasnya sangat terbatas maka operasional perusahaan akan terganggu. Selain itu bila kas yang berlebih akan mengakibatkan timbulnya idle cash, yang merupakan aktiva yang tidak produktif.

Bila dilihat dari keberadaannya di neraca, kas adalah aktiva paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Namun kas juga sangat mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan pemilikinya, maka kas mudah digelapkan. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan yang ketat terhadap kas.

Audit internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang tercapainya sistem pengendalian internal perusahaan. Salah satu pengendalian yang cukup penting adalah mengelola kas

perusahaan. Sebab kas menjadi masalah yang cukup penting apabila terjadi kesalahan dalam penerimaan maupun pengeluaran kas.

Pengendalian akan berhasil bila auditor internal dapat melakukan kerja dengan baik. Sebab auditor internal yang berperilaku kurang baik akan memudahkan penyalahgunaan wewenang sehingga terjadi manipulasi data. Kondisi ini akan berdampak buruk bagi perusahaan yaitu kerugian yang dapat mengurangi perolehan laba perusahaan. Karena itu diperlukan sistem pengendalian internal yang dapat dipertanggung jawabkan dan auditor internal yang mampu dan bermoral dalam melakukan tugasnya.

Dari uraian di atas, maka pokok bahasan dalam makalah tugas akhir ini adalah “Peranan Auditor Internal untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Kas”.

PEMBAHASAN

1. Audit dan Auditing

a. Pengertian Audit

Pickett (2005) dalam Gondodiyoto (2007:28) mengungkapkan bahwa audit berasal dari Bahasa Latin, yaitu *audire* yang berarti *to hear*, atau mendengar. Arti dari mendengar ini muncul karena pada zaman dahulu apabila seorang pemilik organisasi usaha merasa ada suatu kesalahan atau penyalahgunaan, maka mendengarkan kesaksian orang tertentu. Mulyadi (2002:9), juga mengungkapkan definisi audit adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka audit merupakan proses yang objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk kesesuaian dengan kriteria dan hasilnya diberikan kepada yang berkepentingan.

b. Pengertian Auditing

Arens dan Loebbecke (2003:1), menjelaskan bahwa auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tentang informasi ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian informasi ekonomi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *auditing* adalah:

1. Suatu langkah atau prosedur yang bertujuan, terencana, logis, dan berstruktur serta pendekatan yang ilmiah untuk pengambilan keputusan.
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif.
3. Yang berkaitan dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi.

4. Untuk menentukan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Menyampaikan hasil kepada yang berkepentingan.

Perbedaan audit dengan auditing terlihat pada pengertian, yaitu audit adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Sedangkan auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif berdasarkan aseri-asersi kegiatan ekonomi suatu entitas dan menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan selanjutnya mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

c. Jenis-Jenis Auditor

Menurut Mulyadi (2002:28-29), auditor dapat dibedakan menjadi 3 jenis antara lain:

1. Auditor independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).

Untuk berpraktik sebagai auditor independen, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Auditor independen harus telah lulus dari jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi atau mempunyai ijazah disamakan, telah mendapat gelar Akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan, dan mendapat izin praktik dari Menteri Keuangan.

Profesi auditor independen ini mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lain (seperti profesi dokter dan pengacara). Profesi dokter dan pengacara dalam menjalankan keahliannya memperoleh honorarium dari kliennya, dan mereka berpihak kepada kliennya. Profesi auditor independen memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, namun auditor independen harus independen, tidak memihak kepada kliennya. Pihak yang memanfaatkan jasa auditor independen terutama adalah pihak selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikannya tersebut.

2. Auditor pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang

bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Auditor intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

2. Kas

a. Pengertian Kas

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2002:380), kas yaitu aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Kas umumnya diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia pada deposito di Bank.

Kas merupakan salah satu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Daya beli uang bisa berubah-ubah mungkin naik atau turun tetapi

penurunan daya beli ini tidak akan mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas.

Jadi kas merupakan aktiva lancar yang paling liquid dan terdiri dari “pos-pos” yang berlaku sebagai alat tukar dan memberikan dasar pengukuran akuntansi atau seluruh uang tunai dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat diuangkan setiap saat apabila perusahaan membutuhkan.

b. Komposisi Kas

Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, sebagai setoran ke bank, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro atau bilyet, *traveller's checks*, *cashier's checks*, bank draft dan *money order*.

Untuk dapat digolongkan sebagai kas biasanya dibatasi dengan diterima sebagai setoran oleh bank dengan nilai nominal tidak dikelompokkan dalam kas. Jika ada wesel tagih yang diserahkan ke bank untuk ditagihkan, maka wesel tagih ini tetap dicatat sebagai piutang wesel sampai dilunasi oleh yang membuat wesel. Kadang-kadang perangko dapat digunakan untuk pembayaran yang jumlahnya kecil, tetapi perangko tidak akan diterima sebagai setoran oleh bank, maka perangko bukan kas.

Cek mundur (*post dated checks*) tetap dicatat sebagai piutang sampai tanggal dimana cek dapat diuangkan. Cek mundur termasuk dalam kelompok piutang. Surat-surat berharga seperti saham-saham dan obligasi mungkin dapat segera dijual dan menjadi uang tunai, tetapi sebelum dijual surat-surat berharga tersebut tidak termasuk kelompok kas. Sebelum dijual surat berharga tetap dilaporkan sebagai investasi jangka pendek.

Simpanan dalam bank-bank diluar negeri menimbulkan suatu masalah khusus karena mata uang yang berbeda. Oleh karena itu simpanan di bank luar negeri harus dikurskan dalam rupiah. Sering kali simpanan-simpanan di bank luar negeri tidak dapat diambil sewaktu-waktu, oleh karena itu dalam neraca simpanan tadi akan dilaporkan terpisah.

Uang kas yang dibatasi penggunaannya, biasanya dalam bentuk dana, tidak dimasukkan dalam kas tetapi dilaporkan terpisah sebagai dana. Jika penggunaannya masih dalam waktu satu tahun, maka termasuk dalam kelompok aktiva lancar, tetapi jika tidak dapat digunakan dalam waktu satu tahun, maka dilaporkan dalam kelompoka aktiva tidak lancar.

3. Pengendalian intern terhadap kas

Pada umumnya suatu sistem pengawasan intern terhadap kas akan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksana dan pencatatan. Tanpa adanya fungsi seperti diatas, akan mudah menggelapkan uang kas.

Indikator-indikator yang menjadi penyebab terhambatnya praktek yang sehat terhadap efektivitas pengelolaan kas tersebut yaitu:

1. *Perceived Opportunity* (Kesempatan seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan)

Perilaku seseorang untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan dapat terjadi karena Sistem Pengendalian Intern yang lemah dan kurang memberikan kejelasan. Tindakan kecurangan tidak akan berhasil dalam suatu organisasi di mana terdapat Sistem Pengendalian Intern yang kuat dan kesadaran karyawan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Rasionalisasi (Pemikiran perilaku)

Dalam pemikiran mereka, dengan merasionalisasikan perilakunya, pelaku kecurangan biasanya secara modal telah memperoleh suatu alasan terhadap kejahatan mereka. Karena bentuk dan jenis perusahaan ada bermacam-macam, maka sistem pengawasan intern suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lain. Tetapi ada dasar-dasar tertentu yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengadakan pengawasan terhadap kas.

4. Pengertian Efektivitas

Anthony dan Govindarajan (2002:114), efektif ditentukan antar input yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek. Efektivitas adalah suatu keadaan yang

menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih menitik beratkan pada pengendalian intern terhadap siklus persediaan dan pergudangan.

5. Pengendalian Intern

a. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern dapat mempunyai arti sempit atau luas. Dalam artian yang sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Dalam artian luas, pengawasan tidak hanya mekanisme saling uji antara berbagai petugas yang terutama petugas yang bertugas dibidang pembukuan saja, tetapi meliputi semua alat yang digunakan manajemen untuk melakukan pengawasan aktivitas perusahaan.

Menurut Akmal (2006:3), pengendalian internal adalah relativitas pengujian yang memberikan keandalan atau jaminan yang independen, dan obyektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Pengendalian intern merupakan sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi kesatuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara

bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu satuan usaha.

b. Tujuan pengendalian intern

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan (Mulyadi, 2002: 180-181):

1. Keandalan informasi keuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Karena tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam mematuhi. Maka untuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan dengan langkah-langkah yang efisien maka perusahaan harus menerapkan suatu pengendalian intern yang dapat memberikan manfaat yang menyeluruh tanpa mengurangi fungsi bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian intern adalah bertitik tolak dari dua tujuan sistem: menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Tujuan pengendalian intern tersebut kemudian dirinci menjadi tujuan-tujuan umum dan tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi pokok.

c. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Jusuf (2001:249), struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai. Konsep struktur pengendalian intern didasarkan pada dua premis utama. Premis ini adalah tanggung jawab manajemen dan jaminan memadai. Struktur pengendalian intern terdiri dari tiga elemen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian suatu organisasi merupakan dampak kolektif dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan atau memperbaiki efektivitas kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu. Faktor-faktor itu mencakup:

- a. Filosofi dan gaya operasional manajemen
- b. Struktur organisasi
- c. Fungsi dewan komisaris dan anggotanya
- d. Metode-metode membebaskan otoritas dan tanggung jawab.
- e. Metode-metode pengendalian manajemen.
- f. Fungsi audit intern
- g. Kebijakan dan praktik-praktik kepegawaian
- h. Pengaruh dari luar yang berkaitan dengan perusahaan.

2. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,

menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi serta menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang berkaitan. Sistem akuntansi suatu organisasi dapat berbentuk sederhana, dapat pula kompleks. Dokumentasi sistem akuntansi merupakan hal yang penting, prosedur-prosedur akuntansi harus dirancang di dalam pedoman prosedur akuntansi, sehingga kebijakan dan instruksi-instruksi dapat diketahui secara eksplisit dan diterapkan secara seragam. Formulir-formulir yang telah dirancang harus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi. Sistem akuntansi berpasangan harus memuat hal-hal yang memperhatikan kelayakan data yang dicatat. Sistem akuntansi berpasangan tidak dapat diremehkan sebagai alat yang mampu menghasilkan seperangkat catatan.

3. Prosedur Pengendalian

Prosedur-prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur-prosedur yang tercakup dalam lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang harus ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tersebut akan dapat dicapai. Prosedur-prosedur pengendalian memiliki beragam tujuan dan dapat diaplikasi keberbagai tingkatan dalam suatu organisasi. Pengendalian akuntansi intern meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur dan pencatatan yang berhubungan dengan penjagaan aktiva dan kelayakan laporan keuangan. Pengendalian akuntansi intern dirancang untuk memberikan jaminan memadai bahwa

tujuan-tujuan tertentu telah sesuai dengan setiap sistem aplikasi yang signifikan di dalam organisasi.

Untuk setiap perusahaan pengendalian akan berfungsi, apabila terdapat unsur-unsur yang merupakan dasar bagi terlaksananya suatu pengendalian internal yang memadai. Adapun unsur-unsur pengendalian intern menurut Midjan dan Susanto (2006) dalam Sentoso (2006):

1. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan pekerjaan yang tepat.

Pemisahan fungsi merupakan dasar terciptanya sistem pengendalian internal. Penggabungan fungsi akan memperlemah sistem pengendalian internal dan akan mengundang terciptanya *fraude* (penyelewengan). Dengan adanya pemisahan fungsi yang menggambarkan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab, akan memudahkan menciptakan kegiatan internal cek dengan tepat. Pemisahan fungsi tidak hanya merupakan pemisahan fungsi berbagai bagian, tetapi juga dapat berlaku dalam suatu bagian. Selain pemisahan fungsi, yang perlu dipisahkan adalah pekerjaannya. Penggabungan pekerjaan dalam arti berbagai pekerjaan bertumpuk disatu tangan akan menghilangkan ketelitian atas hasil pekerjaan tersebut.

2. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan.

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas (*job description*) yang mengatur tentang tugas, hak dan wewenang masing-masing pejabat beserta seluruh jajarannya sesuai dengan

fungsinya. Uraian tugas tersebut juga harus didukung oleh petunjuk prosedur dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan tugas yang didalamnya terdapat prosedur pelaksanaan suatu kegiatan disertai dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk mengesahkan suatu kegiatan. Agar prosedur dan peraturan-peraturan tersebut ditaati dengan mudah, dapat digunakan bagan alur prosedur dan didukung oleh formulir-formulir yang hanya bisa diisi oleh pihak yang berwenang.

3. Unsur pelaksanaan yang wajar (praktek yang sehat).

Sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya ditaati oleh setiap petugas didalam perusahaan. Agar dapat diharapkan setiap petugas yang terlibat dalam sistem dan prosedur bekerja sebaik mungkin perlu kiranya bagi mereka ditumbuhkan perasaan turut memiliki yang pada akhirnya mendorong mereka memiliki perasaan turut berpartisipasi, rasa turut tanggung jawab dan rasa turut memelihara atau mengamankan. Untuk menjamin terlaksananya praktek yang sehat dalam kegiatan pekerjaan, maka secara teratur perlu dikeluarkan peraturan-peraturan internal berdasarkan surat keputusan direksi berikut penyuluhan yang terarah dan teratur.

4. Unsur kualitas pegawai.

Pengendalian internal hanya akan berfungsi dengan baik apabila petugas pelaksana memiliki kecakapan berdasarkan pengalaman dan pendidikan dengan kualitas yang sesuai dengan tugasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka calon pegawai harus

diseleksi dengan seksama untuk menjaga bahwa hanya orang-orang yang cocok saja bisa diterima dan dipekerjakan pada bidang pekerjaan tersebut.

5. Adanya suatu bagian pengawasan internal (*internal auditing*) Bagian pengawasan internal selain berfungsi untuk mengamankan harta yang dimiliki perusahaan antara lain melalui pemeriksaan fisik, mengevaluasi peraturan-peraturan yang berlaku, juga mempunyai peranan terutama untuk menilai apakah sistem dan prosedur yang sedang berjalan masih sesuai dengan yang diterapkan sebelumnya.

d. Efektivitas Pengendalian Intern Kas

Kas merupakan salah satu harga yang dapat segera ditukarkan dengan harta lain, karena sifatnya sangat likuit dan transaksi kas menyajikan suatu masalah khusus di mana semua transaksi perusahaan pada akhirnya menyangkut kas, maka pengendalian intern atas kas perlu mendapat perhatian dan pengendalian yang efektif (Fathurrachman, 2008).

Sistem pengendalian kas meliputi prosedur-prosedur yang dibuat untuk menjaga atau mengamankan dana perusahaan. Sistem ini menciptakan pengawasan intern yang cukup terhadap kas, diperolehnya data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha serta mendorong dipenuhinya kebijaksanaan pimpinan. Istilah pengawasan intern meliputi sistem-sistem prosedur-prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh

suatu perusahaan untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak. Pengawasan intern didefenisikan oleh AICPA (Nasution, 2004). Pengawasan intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Pengendalian kas merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengawasan intern secara umum. Oleh karena itu segala sesuatu mengenai pengawasan intern juga berlaku terhadap pengawasan kas sebagai bagian yang lebih khusus dan mendetail. Pengendalian kas akan preventif apabila semua pembayaran tunai dilakukan melalui cek dan penerimaan kas langsung disetorkan bank. Hampir setiap perusahaan perlu membayar sejumlah uang kecil untuk membiayai makan siang karyawan, ongkos buruh, perlengkapan kantor yang kecil, dan beban rupa-rupa lainnya. Apabila manajemen akan mengubah batasan saldo minimal dan saldo maksimal kas kecil, kebijakan baru tersebut diumumkan secara resmi dan disosialisasikan kepada semua pihak di perusahaan.

Fungsi pengendalian kas secara umum antara lain ialah untuk menjamin terselenggaranya pencatatan kas yang akurat, tersimpannya kas dengan aman dan adanya pengeluaran kas yang

dilakukan dan disahkan oleh personil yang berwenang dengan jumlah yang benar. Ciri-ciri dasar dari sebuah pengendalian kas adalah sebagai berikut :

1. Secara khusus menetapkan tanggung jawab pengelolaan penerimaan kas.
2. Pemisahaan pengelolaan dan pencatatan penerimaan kas.
3. Mennyetorkan seluruh kas yang diterima setiap hari.
4. Sistem *voucher* untuk mengendalikan pembayaran kas.
5. Pemeriksaan intern dalam interval waktu yang tak terduga.

Fungsi pengawasan meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai sejauh mana pelaksanaan perencanaan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.

e. Pentingnya Pengendalian

Menurut Weber (1999) dalam Gondodiyoto (2007:62), faktor-faktor yang mendorong pentingnya pengendalian, antara lain untuk:

1. Mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah, tidak ada visi, misi, perencanaan teknologi informasi (*TI Plan*, *information technology plan*), pucuk pimpinan organisasi kurang peduli, tidak ada pelatihan dan pola karier personil yang baik, dan sebagainya.
2. Mendeteksi resiko kehilangan data.

3. Mendeteksi resiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses komputerisasi salah/lambat/tidak lengkap.
4. Menjaga aset perusahaan, khususnya aset sistem informasi, karena nilai *hardware*, *software* dan personil yang tinggi.
5. Mendeteksi resiko *error* komputer.
6. Mendeteksi resiko penyalahgunaan komputer (*fraud*).
7. Menjaga kerahasiaan, maksudnya ialah bahwa sistem informasi berbasis teknologi informasi (apalagi yang didesain dengan jaringan publik), hendaknya mempunyai kemampuan untuk memproteksi data, aman, dan terjaga *privacy* para penggunanya.
8. Meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer, yaitu jaringan sampai suatu organisasi atau perusahaan melakukan komputerisasi secara tidak terkendali sehingga terjadi pemborosan-pemborosan atau tingkat keamanan kurang.

6. Peranan Auditor Internal untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Kas

Suatu perusahaan yang telah berjalan tidak boleh tidak memonitor kegiatannya dan hasilnya. Manajemen menugaskan auditor internal yang memiliki pandangan dan sikap yang profesional untuk memajukan atau meningkatkan hasil yang telah dicapainya. Pandangan dan sikap tersebut di atas dinyatakan dalam kesibukan manajemen untuk selalu melihat, meneliti, menganalisa dan mengambil keputusan atas laporan-laporan keuangan.

Auditor internal melakukan pemeriksaan terus-menerus dan analisa laporan dan catatan-catatan sering disebut pengendalian intern. Sistem pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen di atas, dalam arti yang tegas, dan sistem tersebut akan: (a) mengamankan sumber dari pemborosan, kecurangan, dan ketidaha efisienan, (b) meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, (c) mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan, (d) meningkatkan efisiensi.

Sistem pengendalian intern tersebut akan berada dan mempengaruhi semua kegiatan perusahaan. Ini meliputi metode-metode dimana manajemen atas akan memberi delegasi atau wewenang dan memberi tanggung jawab untuk fungsi pembelian, penjualan produksi dan akuntansi. Dalam akuntansi, SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang berlaku dalam perusahaan/entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang di auditnya, Auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas SPI dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi.

Dalam penerapan sistem pengendalian intern pada perusahaan perlu dilakukan evaluasi sistem pengendalian intern oleh auditor internal. Sebab evaluasi tersebut dapat berdampak pada kelancaran perusahaan yang pasti ada dan jumlahnya cukup material mencakup segala bagian perusahaan, sehingga pengendalian

intern sangat dibutuhkan perusahaan untuk menghindari kecurangan atau manipulasi yang dilakukan karyawan. Auditor internal melakukan pengecekan secara berkala setiap akhir bulan terhadap laporan keuangan perusahaan berkala. Hal ini bertujuan untuk melihat secara global laporan keuangan, sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan analisis pendanaan.

Auditor internal jika sebuah perusahaan dikelola oleh manajer profesional, maka dalam perusahaan ini terdapat pemisahan antara pemilik dan pemimpin perusahaan. Pemilik menyerahkan pengelolaan kekayaannya kepada manajer profesional tersebut, dan dengan demikian manajer profesional berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan kekayaan tersebut kepada pemiliknya.

Pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan pemilik perusahaan ini disajikan dalam laporan keuangan. Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik tidaknya pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan. Jika pengendalian intern dirancang dan ditetapkan dengan baik oleh manajemen di dalam pengelolaan perusahaannya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalannya.

Menurut Simamora (2000:213), pengendalian kas akan preventif apabila semua pembayaran tunai dilakukan melalui cek dan penerimaan kas langsung disetorkan bank. Hampir setiap perusahaan perlu membayar sejumlah uang kecil untuk membiayai makan siang

karyawan, ongkos buruh, perlengkapan kantor yang kecil, dan beban rupa-rupa lainnya. Menurut Muda (2003:323), *cash opname* adalah perhitungan fisik uang. Di awal pembentukan kas, manajemen menetapkan nominal yang pasti mengenai saldo minimal dan saldo maksimal atas kas. Apabila manajemen akan mengubah batasan saldo minimal dan saldo maksimal kas, kebijakan baru tersebut diumumkan secara resmi dan disosialisasikan kepada semua pihak di perusahaan. Sistem *imprest* pada saat dibelanjakan tidak perlu di jurnal artinya cukup membuat catatan yang tujuan untuk menghitung kas yang masih ada akan tetapi membuat bukti pembayaran dan menyimpannya sebagai bukti. Sehingga apabila pada suatu saat dana kas diperiksa (*cash opname*) pemegang dana kas harus dapat mempertanggungjawabkan mengenai sisa yang ada ditambah jumlah bukti yang pembayaran yang telah dilakukan dan jumlahnya harus sama dengan jumlah dana tetap kas.

Namun pemakaian cek untuk pembayaran semacam itu tidak praktis, maka perlu adanya pengendalian terhadap pembayaran tersebut (Simamora, 2000:214). Untuk pengeluaran kas kecil sebagai berikut:

1. Seseorang ditugasi untuk mengawasi kas kecil dan diberikan sejumlah uang kecil untuk melakukan pembayaran yang bernilai kecil.
2. Ketika pengeluaran dilakukan, pengawas kas kecil mendapatkan tanda terima yang telah ditandatangani dari setiap individu yang menerima pembayaran kas.

3. Ketika kas kecil telah menipis, pengawas dapat meminta tambahan kas dari kasir umum untuk pengisian kembali yang didukung oleh tanda terima kas kecil dan bukti pengeluaran lain. Pengawas kas kecil menerima cek perusahaan untuk mengisi kembali dana itu.
4. Jika diputuskan bahwa jumlah kas yang terdapat dalam dana kas kecil berlebihan, penyesuaian dibuat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian intern pada perusahaan perlu dilakukan evaluasi sistem pengendalian intern oleh auditor internal
2. Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik tidaknya pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan.
3. Pengendalian intern dirancang dan ditetapkan dengan baik oleh manajemen di dalam pengelolaan perusahaannya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalannya.
4. Sistem efektivitas pengendalian kas meliputi prosedur-prosedur yang dibuat untuk menjaga atau mengamankan dana perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R.N., dan Govindarajan, V., 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akmal, 2006, *Pemeriksaan Internal (Internal Audit)*, Jakarta: Indeks.
- Arens, A.A, dan Loebbecke, J.K., 2003, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Buku Satu, Jakarta: Salemba Empat.
- Fathurrachman, Tb. A., 2008, Pengaruh Internal Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Kas Pada Industri Textil di Rancaekek Kabupaten Bandung, *Percikan*: Vol. 91 Edisi Agustus.
- Gondodiyoto, S., 2007, *Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jusuf., A.H.,, 2001, *Auditing: Pengauditan.*, Yogyakarta: YKPN UGM.
- Kieso, D.E., Jerry J.W., dan Terry D.W., 2002, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kesepuluh, Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, 2002, *Auditing*, Buku Satu, Edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, M., 2004, Pengawasan Internal Kas, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Sentoso, L.A., 2006, Manfaat Pengendalian Internal Persediaan Dalam Menunjang Efektifitas Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan (Survei pada PT “X” di Bandung), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama, Bandung